



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN ANGGARAN 2022



SEKRETARIAT DAERAH KOTA
MAKASSAR

**L ,APORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MAKASSAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Anugerahnya sehingga Sekretariat Daerah Kota Makassar telah Berhasil Menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022.

Pertanggungjawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai cita, citra dan harapan terciptanya sebuah tata Kelola keuangan yang baik. Sejalan Dengan Itu , Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Makassar telah memenuhi kewajiban yang diamanatkan Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerbitan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintgahan yang baik (good governance)

Kami harapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat menjadi salah satu evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selajutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahap berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kota Makassar dan semua pihak yang telah memberikan Kontribusi dalam penyusunan laporan ini

Makassar, 3 Februari 2023
**SEKRETARIS DAERAH KOTA
MAKASSAR,**



Ir. M. Ansar, MSi

Pangkat: Pembina Utama Madya/IV d

NIP. 196312311992031206

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kota Makassar yang memuat hal-hal sebagai berikut pendahuluan, Rencana Strategis dan Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas kinerja meliputi Pengukuran Pencapaian Sasaran dan Analisis Akuntabilitas Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2022 2 (dua) sasaran dengan 20 (dua puluh) indikator sasaran hasil evaluasi menunjukkan rata-rata pencapaian indikator kinerja sebesar 82,8% atau dengan kategori penilaian **Baik**.
2. Untuk Mencapai indikator sasaran tersebut telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja, dengan demikian kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar yang telah dicapai dikategorikan rendah, dikarenakan beberapa kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja tidak terlaksana sepenuhnya.
3. Faktor-Faktor Penghambat sehingga tidak tercapainya target kinerja dapat menjadi perhatian untuk keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah kedepannya. Dengan adanya komitmen Bersama dalam menyukseskan program-program prioritas Sekretariat daerah kota makassar yang ditunjukkan dengan ketersediaan dana yang cukup memadai, demikian pula sarana dan prasarana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	
PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. TUGAS DAN FUNGSI	4
C. PERMASALAHAN UTAMA	9
D. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	12
A. TUJUAN DAN SASARAN	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
C. PERJANJIAN KINERJA	21
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
B. REALISASI ANGGARAN	59
BAB IV	
PENUTUP	60
A. KESIMPULAN	60
B. REKOMENDASI	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat Daerah Kota Makassar merupakan lembaga Pemerintah Kota Makassar yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Makassar.

Sekretariat Daerah Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Daerah Kota Makassar mempunyai tugas membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program kerja Sekretariat Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan keorganisasian serta teknik administrasi

- berdasarkan potensi yang dimiliki Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya;
- g. mengkaji, menelaah dan merumuskan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian serta teknik administrasi;
 - h. menjabarkan instruksi/perintah atasan, petunjuk pelaksanaan serta masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mempelajari, memahami serta disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan;
 - i. mendistribusikan tugas kepada para Asisten, kepala Bagian, kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - j. mengoordinasikan perumusan kebijakan pembangunan, pengelolaan anggaran dan pengendaliannya untuk kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaannya;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan keorganisasian, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
 - l. mengoordinasikan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - m. merumuskan sasaran pelaksanaan operasional program dan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan. keorganisasian serta administrasi dengan memadukan program kerja pemerintah dan disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga tepat mutu, kualitas dan sasaran;
 - n. membina pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketatalaksanaan, keorganisasian serta pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana melalui petunjuk teknis, pengarahan, ceramah, pelatihan dan penyuluhan guna meningkatkan mutu, ketrampilan dan tertib administrasi;
 - o. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh kepala Perangkat Daerah;
 - p. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh kepala Perangkat Daerah dalam rangka pengendalian melalui rapat teknis, permintaan data laporan, pemantauan lapangan, sehingga dapat diperoleh kebenaran dan perkembangannya;
 - q. menganalisa data maupun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari Perangkat Daerah pada semua bidang dengan mempelajari, memahami dan meneliti kembali sehingga diperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut;
 - r. mengendalikan semua jenis kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah melalui rapat teknis, permintaan data maupun pelaporan kegiatan secara periodik maupun insidental, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terkendali sesuai program dan ketentuan yang berlaku;
 - s. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keorganisasian kepada Walikota sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - t. merumuskan kebijakan teknis penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Daerah dalam penyelenggaraan kewenangannya baik urusan wajib, urusan pilihan, tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah;

- u. memberi penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap para Asisten, kepala Perangkat Daerah melalui pengisian maupun pencatatan pada sasaran kerja pegawai dalam upaya peningkatan prestasi kerja dan disiplin pegawai;
- v. menyampaikan saran pertimbangan dan/atau telaahan staf kepada Walikota sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan;
- w. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- x. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- z. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama yang terdiri atas:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Bagian Hukum; dan
 - 4) Bagian Kerjasama.
- c. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas:
 - 1) Bagian Perekonomian;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, yang terdiri atas:
 - a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 4) Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol, perencanaan dan keuangan yang terdiri atas:
 - 1) Bagian Organisasi;
 - 2) Bagian Umum yang terdiri atas :
 - a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Rumah Tangga.
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas :
 - a. Subbagian Pengaturan Acara;
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kota Makassar, diperlukan sumber daya manusia dan sarana/perengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan

Kualitas Sumber Daya Manusia PNS dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki atau pengalaman dalam bekerja. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah pegawai pada Setda Kota Makassar dengan klasifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan

No	Bagian	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1.	Bagian Pemberdayaan Masyarakat	-	-	2	-	7	6	-	15
2.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	10	3	-	13
3.	Bagian Umum	1	3	30	1	24	20	1	80
4.	Bagian Organisasi	-	-	-	-	5	4	-	9
5.	Bagian Protokol	-	-	4	-	11	4	-	19
6.	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	1	-	3	6	-	10
7.	Bagian Kesra	-	-	-	-	7	4	-	11
8.	Bagian Hukum	-	-	1	-	10	5	-	16
9.	Bagian Kerjasama	-	-	-	-	3	2	-	5
10.	Bagian Perekonomian	-	-	-	-	3	8	-	11
11.	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	2	1	11	3	-	17
12.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	1	1	23	13	-	38
Jumlah		1	3	41	3	117	78	1	244

b. Pangkat/Golongan

Sumber Daya Manusia PNS berdasarkan pangkat/golongan pada Setda Kota Makassar dengan klasifikasi pangkat/golongan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Makassar, menurut Pangkat/Golongan

No	Bagian	Pangkat/gol.				Jumlah PNS
		I	II	III	IV	
1.	Bagian Pemberdayaan Masyarakat	-	4	4	6	14
2.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	-	10	2	12
3.	Bagian Umum	4	24	23	23	74
4.	Bagian Organisasi	-	-	7	1	8
5.	Bagian Protokol	1	3	8	3	15
6.	Bagian Tata Pemerintahan	-	2	6	4	12
7.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	1	5	3	9
8.	Bagian Hukum	-	1	13	1	15
9.	Bagian Kerjasama	-	-	7	1	8
10.	Bagian Perekonomian	-	-	6	3	9
11.	Bagian Administrasi Pembangunan	-	3	12	1	16
12.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	3	29	6	38
Jumlah		5	41	130	54	230

c. Jenis Kelamin/gender

Sumber Daya Manusia PNS berdasarkan Jenis Kelamin/gender pada Setda Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Makassar menurut jenis kelamin

No	Bagian	Jumlah PNS		Jumlah
		Lak- laki	Perempuan	
1.	Bagian Pemberdayaan Masyarakat	9	5	14
2.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	7	12
3.	Bagian Umum	53	21	74
4.	Bagian Organisasi	2	6	8
5.	Bagian Protokol	9	6	15
6.	Bagian Tata Pemerintahan	10	2	12
7.	Bagian Kesra	4	5	9
8.	Bagian Hukum	6	9	15
9.	Bagian Kerjasama	4	4	8
10.	Bagian Perekonomian	4	5	9
11.	Bagian Administrasi Pembangunan	4	12	16
12.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	19	19	38
Jumlah		129	101	230

C. PERMASALAHAN UTAMA

Dari 4 program Sekretariat Daerah Kota Makassar permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya yang dituangkan kedalam tugas dan fungsi, adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat :

1) Faktor Pendorong :

- Ketersediaan Dana;
- Proses Pelaksanaan Rapat, Proses Sinkronisasi kegiatan tetap berjalan.

2) Faktor Penghambat :

- Kurangnya Sarana dan Prasarana SDM serta keterlambatan proses Administrasi dokumen pelaksanaan anggaran;
- Beberapa kali pergantian/mutasi pejabat serta keterlambatan administrasi proses pencairan dokumen keuangan;

- c. Dukungan administrasi kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa mengalami keterlambatan yang disebabkan adanya pembatasan sistem kerja pegawai selama pandemi covid-19.
- 3) Tindak Lanjut :**
- a. Perlunya koordinasi pada tahap asistensi dan peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perlunya koordinasi yang intensif dari pejabat baru dengan pejabat lama serta koordinasi dengan para pengelola keuangan;
 - c. Perlunya koordinasi yang intensif dengan para pengelola keuangan dengan pengadaan barang dan jasa serta diharapkan para pegawai tetap memenuhi protokol kesehatan;
 - d. Pegawai tetap mematuhi protokol kesehatan dan koordinasi dengan instansi terkait perihal keterbatasan SDM yang ada.
- 2. Program Perekonomian dan Pembangunan:**
- 1) Faktor pendorong :**
- a. Dukungan Ketersediaan dana;
 - b. Koordinasi dan Komunikasi dengan BUMD/BLUD dan Stakeholder lainnya yang terjalin dengan baik.
- 2) Faktor penghambat :**
- a. Adanya penyesuaian/restrukturisasi perangkat daerah sehingga masih membutuhkan penyesuaian-penyesuaian;
 - b. Keterlambatan Pencairan anggaran kas dan masih terjadinya wabah pandemi covid serta adanya restrukturisasi /pergantian pejabat lingkup sekretariat daerah kota makassar;
 - c. Adanya revisi-revisi peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa serta pembatasan sistem kerja pegawai selama covid 19.
- 3) Tindak lanjut:**
- a. Diharapkan SDM yang ada mampu memahami dan menyesuaikan tupoksi serta tugas-tugas tambahan yang diberikan pimpinan melalui koordinasi-koordinasi yang intensif baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar pemerintah Kota Makassar;
 - b. Agar pencairan dana kegiatan dapat dipercepat sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan;
 - c. Diharapkan SDM yang ada untuk memahami dan memutakhirkan revisi peraturan perundang-undangan tersebut serta diharapkan para pegawai tetap mematuhi protokol kesehatan.
- 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat:**
- 1) Faktor pendorong :**
- Koordinasi dengan para Stakeholder dan Lembaga kemasyarakatan tetap berjalan dengan baik.
- 2) Faktor penghambat :**
- Keterlambatan pencairan anggaran kas;
 - Masih terjadinya wabah pandemi covid-19;
 - Adanya restrukturisasi/pergantian pejabat lingkup pemerintah kota makassar.
- 3) Tindak lanjut :**

Agar Pencairan dana kegiatan dapat dipercepat agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Faktor pendorong :

- a. kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran yang terencana dalam anggaran kas serta dukungan sumber daya pegawai yang cukup tersedia;
- b. kegiatan ini adalah Proses pelaksanaan kegiatan tetap terlaksana
- c. kegiatan ini adalah Ketersediaan dana serta kerjasama pimpinan dan staf yang tetap efektif dalam menjalankan pelayanan keprotokoleraan dan komunikasi pimpinan.

2) Faktor penghambat :

- a. Adanya penyesuaian/restrukturisasi perangkat daerah sehingga masih membutuhkan penyesuaian-penyesuaian;
- b. Keterlambatan Pencairan anggaran kas;

3) Adanya revisi-revisi peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa **Tindak lanjut:**

- a. Diharapkan SDM yang ada mampu memahami dan menyesuaikan tupoksi serta tugas-tugas tambahan yang diberikan pimpinan melalui koordinasi-koordinasi yang intensif baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar pemerintah Kota Makassar;
- b. Agar pencairan dana kegiatan dapat dipercepat sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan;
- c. Diharapkan SDM yang ada untuk memahami dan memutakhirkan revisi peraturan perundang-undangan tersebut serta diharapkan para pegawai tetap mematuhi protokol kesehatan

Dari 4 (Empat) program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Makassar memiliki 20 (Dua Puluh) target kinerja dengan rata-rata capaian kinerja **76.22%** atau dengan kriteria penilaian **Baik**.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Sekretariat Daerah yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan gambaran umum dan permasalahan Sekretariat Daerah Kota Makassar.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020 Sekretariat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1) Capaian Kinerja Organisasi

Berisikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2) Realisasi Anggaran

Berisikan uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka menunjang pencapaian program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2022, diuraikan sebagai berikut :

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada isu-isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN KERJA	INDIKATOR KINERJA
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian Terlaksananya Administrasi Pembangunan Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Terselenggaranya Kegiatan kegiatan Kelembagaan kemasyarakatan di 153 Kelurahan di Kota Makassar
	Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Terlaksananya Penataan Organisasi Terlaksananya Fasilitasi Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Makassar

SASARAN KERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	Persentase	Jumlah Dokumen perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	4 Dokumen	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	2 laporan	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	4 laporan	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan Instansi/Lembaga/ Perangkat daerah	12 Kegiatan	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah rapat koordinasi pelaksaman tugas bidang kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	4 Kegiatan	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Dokumen Penetapan Kode dan Data Kewilayahan	1 laporan	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah	168 Kec/Kel	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan wilayah	5 kec/kel	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan penegasan batas wilayah	42 kec/kel	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah Kelurahan yang dilakukan pemantapan penyelenggaraan dana kelurahan	153 Kel	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah keputusan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat	4 Dokumen	Bagian Tata Pemerintahan
			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan	15 laporan	Bagian Tata Pemerintahan

		Jumlah dokumen laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	1 laporan	Bagian Tata Pemerintahan
		Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tersusun	1 laporan	Bagian Tata Pemerintahan
		Jumlah laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah	1 laporan	Bagian Tata Pemerintahan
		Jumlah laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun walikota	1 laporan	Bagian Tata Pemerintahan
		Jumlah peralatan komputer jaringan sistem informasi E-LPPD dan E-Eppd	4 unit	Bagian Tata Pemerintahan
		Jumlah usul dan keputusan pergantian antar waktu pimpinan dan anggota DPRD Kota	6 dokumen	Bagian Tata Pemerintahan
		Jumlah usul dan surat lain/cuti KDH/WKDH	6 dokumen	Bagian Tata Pemerintahan
Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan/ Kebijakan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pengelolaan bina mental spiritual	22 kegiatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	5 kebijakan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	5 kebijakan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah	Persentase	Jumlah Pelaksanaan kegiatan pengelolaan bina mental spiritual	120 PRODUK HUKUM	Bagian Hukum
		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	12 PERKARA	Bagian Hukum
		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	120 PRODUK HUKUM	Bagian Hukum
Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	Persentase	Jumlah dokumen kerjasama dalam negeri yang ditandatangani.	20 dokumen kerjasama	Bagian Kerjasama
		Jumlah dokumen kerjasama dalam negeri yang mempunyai rekomendasi dari Tim Koordinasi.	20 dokumen kerjasama	Bagian Kerjasama
		Jumlah Kesepakatan Kerjasama yang tercapai.	20 dokumen kerjasama	Bagian Kerjasama
		Forum infestasi luar negeri.	2 Forum Kerjasama	Bagian Kerjasama
		Jumlah dokumen kerjasama luar negeri.	2 Dokumen Kerjasama	Bagian Kerjasama

		Jumlah laporan hasil pelaksanaan kerjasama luar negeri.	1 Laporan	Bagian Kerjasama
		Buku Potensi Kerjasama.	100 Exemplar	Bagian Kerjasama
		Jumlah laporan dan data kerjasama secara berkala yang didokumentasikan.	1 laporan	Bagian Kerjasama
		Monev Kerjasama Luar Negeri	1 laporan	Bagian Kerjasama
Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik	Persentase	Jumlah Laporan Kinerja Manajemen dan Keuangan BUMD dan BLUD	26 laporan BUMD/BLUD	Bagian Perekonomian
		Jumlah pelaksanaan kegiatan asesment BLUD dan BUMD	2 kegiatan	Bagian Perekonomian
		Jumlah rapat koordinasi khusus sosialisasi, workshop, bimtek lingkup BLUD dan BUMD Kota Makassar	4 kali	Bagian Perekonomian
		Tersusunnya dokumen bisnis plan dan corporate plan/RKAP BUMD dan BLUD	12 dokumen	Bagian Perekonomian
		Jumlah laporan informasi dan rekomendasi distribusi dan pengendalian perekonomian	2 Laporan	Bagian Perekonomian
		Jumlah rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah	4 kali	Bagian Perekonomian
		Jumlah kegiatan sosialisasi/FGD terkait pengendalian dan distribusi perekonomian	2 kegiatan	Bagian Perekonomian
		Jumlah rapat koordinasi	4 kali	Bagian Perekonomian
		Jumlah peserta yang diedukasi	180 orang	Bagian Perekonomian
		Jumlah Laporan informasi dan rekomendasi terkait perencanaan dan pengawasan usaha mikro kecil	2 laporan	Bagian Perekonomian
Terlaksananya Administrasi Pembangunan	12 Kegiatan	Jumlah dokumen penyusunan program pembangunan yang di fasilitasi	1 dokumen	Bagian Administrasi Pembangunan
		Jumlah CSR yang di fasilitasi	1 dokumen	Bagian Administrasi Pembangunan
		Jumlah dokumen program pembangunan yang dikendalikan dan dievaluasi	1 dokumen	Bagian Administrasi Pembangunan
		Jumlah SKPD yang mendapatkan DAK	1 dokumen	Bagian Administrasi Pembangunan

			% SKPD yang mengisi laporan evaluasi dan pengawasan anggaran pada aplikasi SISMONTEPRA tepat waktu	100%	Bagian Administrasi Pembangunan
	Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Level	Jumlah pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilayani	200 paket	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan	7 fungsi layanan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Jumlah bimbingan teknis/sosialisasi yang dilaksanakan, jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan barang dan jasa	6 kegiatan dan 15 SKPD	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Terselenggaranya Kegiatan kegiatan Kelembagaan kemasyarakatan di 153	Kelurahan	Terselenggaranya pembinaan kelembagaan, RT/RW dan PKK	153 kelurahan	Bagian Pemberdayaan Masyarakat
			Terselenggaranya pembinaan LPM dan peningkatan peran kelembagaan dalam kegiatan pengembangan kelurahan	153 kelurahan	Bagian Pemberdayaan Masyarakat
			Terselenggaranya sayembara dan pembinaan kelompok TTG	153 kelurahan	Bagian Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat daerah yang disusun	2 dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	60 Dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	25 dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	3 dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4 laporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan	Dokumen	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	14 bulan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah bulan bulan Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan	12 bulan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
			% Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian yang terverifikasi	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan

		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 laporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Jumlah kegiatan penyusunan bahan tanggapan pemeriksaan	4 kegiatan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Jumlah laporan keuangan bulanan yang tersusun	12 laporan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Jumlah pimpinan dan keluarga yang mendapatkan jasa perawatan kesehatan (Medical check-up)	8 orang	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Jumlah bulan penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 laporan	Bagian Umum
		Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	4 dokumen	Bagian Umum
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	Jumlah pakain dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	2192 stel	Bagian Umum
		terlaksananya pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	120 orang	Bagian Umum
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	Jumlah komponen instalasi listik/penerangan bangunan gedung yang diadakan	36 jenis	Bagian Umum
		jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	30 jenis	Bagian Umum
		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2.112 bahan bacaan	Bagian Umum
		Jumlah kunjungan tamu pemerintah kota Makassar yang di fasilitasi	200 kunjungan	Bagian Umum
		jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	141 perjalanan	Bagian Umum
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

		Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Jumlah mobileur yang diadakan	10 jenis	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	17 jenis	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tersedia	10.500 surat	Bagian Umum
		Jumlah penyediaan kebutuhan jasa telepon, air dan listrik	12 bulan	Bagian Umum
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 jenis	Bagian Umum
		Jumlah tenaga kebersihan yang terlibat dalam kebersihan kantor	300 orang	Bagian Umum
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang pajaknya diperpanjang dan dipelihara	10 unit	Bagian Umum
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajaknya dibayar dan dipelihara	439 unit	Bagian Umum
		Jumlah mebeleur yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	3 gedung kantor	Bagian Umum
		Jumlah bangunan / gedung yang peralatan dan mesinnya mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	6 bangunan/gedung	Bagian Umum
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	6 bangunan/gedung	Bagian Umum
Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase	Jumlah kebutuhan rumah tangga kepala daerah	1 rumah jabatan	Bagian Umum
		Jumlah kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	1 rumah jabatan	Bagian Umum
		Jumlah kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	1 rumah dinas	Bagian Umum

Terlaksananya Penataan Organisasi	Persentase	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan yang dilaksanakan	5 dokumen	Bagian Organisasi
		Jumlah Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana yang dilaksanakan	5 dokumen	Bagian Organisasi
		Jumlah dokumen 'Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	2 dokumen	Bagian Organisasi
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	Pelayanan	Jumlah pelayanan Fasilitasi Keprotokoleran Pemerintah Kota Makassar yang mendapat layanan keprotokoleran	840 Pelayanan	Bagian Protokol
		Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan	320 Pelayanan	Bagian Protokol
		Jumlah Pendokumentasian Kegiatan Tugas Pimpinan Daerah yang dilaksanakan	240 dokumen	Bagian Protokol

C. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya, Rencana kinerja secara formal dan detail untuk Tahun 2022 telah dibuat dalam Rencana Kerja. Sekretariat Daerah Kota Makassar juga telah membuat dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan perjanjian kinerja antara seluruh Kepala Bagian dengan Sekretaris Daerah dan antara Sekretaris Daerah dengan Walikota Makassar. Dalam dokumen perjanjian kinerja ini ditetapkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan komitmen seluruh Bagian untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi Misi Organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Sekretariat Daerah Kota Makassar sepenuhnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	100%
	Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10 Kebijakan
	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah	100%
	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar	100%
	Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik	100%
	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	12 Kegiatan
	Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	3 level
	Terselenggaranya Kegiatan kegiatan Kelembagaan	153 Kelurahan
Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen
	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan	18 Dokumen
	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

	Terlaksananya Pemeliharaan Barang	100%
	Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%
	Terlaksananya Penataan Organisasi	100%
	Terlaksananya Fasilitas Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refotmasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja program utama dengan target yang telah ditetapkan. Target tersebut merupakan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2021 dengan berdasarkan pada indikator kinerja program yang telah ditetapkan. Selain pengukuran atas pencapaian target LAKIP juga menyajikan analisis kinerja atas hasil dari program utama yang telah dicapai dengan melakukan analisis perbandingan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya (*trend analysis*). Analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi dilakukan dengan melihat selisih antara target dengan capaian indikator yang telah ditetapkan. Perbedaan selisih tersebut akan digunakan untuk melihat strategi pemecahan dan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja mengalami perubahan target kinerja.

Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

a) Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	% REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
		Administrasi Tata Pemerintahan	100%	Bagian Tata Pemerintahan	81,64	60,37 %
		Penataan Administrasi Pemerintahan				
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					
	Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10 Kebijakan/ 100%	Bagian Kesejahteraan Masyarakat	93,74	89,85 %
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				
	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Sosial	100%	Bagian Hukum	79,42	68,59 %
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				
	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	Fasilitasi Bantuan Hukum	100%	Bagian Kerjasama	67,46	78,64 %
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				
Fasilitasi Kerjasama Daerah						
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						
Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	100%	Bagian Perekonomian	59,33	66,56 %	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil					
Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	12 Kegiatan/ 100%	Bagian Administrasi Pembangunan	87,24	87,75 %	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan					
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					
Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 level	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	73,37	54,26 %	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					
Terselenggaranya Kegiatan-kegiatan Kelembagaan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	153 Kelurahan/ 100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	83,50	76,16%	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan	66,45	87,45%
	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	Bagian Perencanaan dan Keuangan	80,75	92,05%
	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	87,03	50,87%
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	Bagian Umum	78,15	84,77%
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	Bagian Umum	82,86	48,11%
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Bagian Umum	94,20	82,31%
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	Bagian Umum	87,84	89,93%
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	Bagian Umum	96,30	94,00%
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	Bagian Umum	79,62	58,10%
	Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100%	Bagian Umum	94,36	91,53%
	Terlaksananya Penataan Organisasi	Penataan Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100%	Bagian Organisasi	96,41	82,88%
	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokoliran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokoliran Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100%	Bagian Protokol	86,26	80,19%

Penjelasan :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dibagi ke 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.11.289.732.500,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 10.524.038.964,- dengan realisasi fisik dari 153 Kelurahan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 93% dan realisasi keuangan sebesar 93,22%.
- b. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.10.307.501.400,- sampai bulan Desember Tahun 2022, telah terealisasi sebesar Rp 7.181.421.044,- dengan realisasi fisik dari 153 Kelurahan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sudah dilaksanakan sebanyak 69% dengan realisasi keuangan sebesar 69,67 %.
- c. Fasilitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.741.218.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 2.617.882.725,- dengan realisasi fisik dari 15 Kelompok Tekhnologi Tepat Guna yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember 2022, sebesar 95% dan realisasi keuangan sebesar 95,50%.

Adapun **faktor pendukung** dari Kegiatan ini yakni Koordinasi dengan para Stake Holder dan lembaga kemasyarakatan tetap berjalan dengan baik, faktor penghambat dan pencapaian pada sub kegiatan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yaitu pemilu raya RT/RW secara digital belum dilaksanakan karena masih menuai pro kontra di masyarakat

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari 12 (Dua Belas) Kegiatan yaitu

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 9) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 10) Fasilitas Kerumahraggan Sekretariat Daerah.
- 11) Penataan Organisasi.
- 12) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 (Lima) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 193.900.300,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.144.789.141,- dengan realisasi fisik dari 2 Dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022 berupa dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 (1 dokumen) dan Rencana Kerja Tahun 2023 (1 dokumen), sampai saat ini 2 dokumen tersebut telah dilaksanakan. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 74.67%.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.38.833.000,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.28.748.000, dengan realisasi fisik dari 60 dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022 berupa 2 (dua) jenis dokumen RKA-SKPD yaitu dokumen RKA-SKPD Perubahan 30 rangkap dan RKA-SKPD Pokok 30 rangkap, sampai saat ini telah dilaksanakan pencetakan 30 rangkap dokumen RKA-SKPD Perubahan TA.2022 dan 30 rangkap RKA SKPD Pokok 2023. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 74.03%.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.29.338.000,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.15.119.250,- dengan realisasi fisik dari 25 dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022 berupa 2 (dua) jenis dokumen DPA-SKPD yaitu dokumen DPA-SKPD Pokok sebanyak 12 rangkap dan dokumen DPA-SKPD Perubahan sebanyak 13 rangkap, sampai saat ini telah dilaksanakan pencetakan 12 rangkap dokumen DPA-SKPD Pokok TA.2022.

Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 51.53%.

- 4) Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.36.384.000,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.20.103.000,- dengan realisasi fisik dari 3 dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022 berupa 1 dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, 1 dokumen SK. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022, dan 1 dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, sampai saat ini 3 dokumen tersebut telah dilaksanakan. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 55.25%.
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.37.734.000,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.14.716.600,- dengan realisasi fisik dari 4 laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini ada 3 laporan yang terlaksana yaitu 1 laporan triwulan I, 1 laporan triwulan II, 1 Laporan Triwulan III dan 1 laporan triwulan IV Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 39%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 6 (Enam) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.35.184.737.358,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.28.787.185.311,- dengan realisasi fisik dari 14 bulan (14 kali) yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini ada 14 bulan (14 kali) yang terlaksana. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 81.82%.
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.350.546.000,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.1.605.927.850,- dengan realisasi fisik dari 12 bulan (12 kali) yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terlaksana sebanyak 12 bulan Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 68.32%.
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.856.669.800,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.631.223.329,- dengan realisasi fisik dari 100% yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022,

sampai saat ini telah realisasi fisik telah dilaksanakan dan mencapai sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 73.68%.

- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.38.061.000,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.15.715.050,- dengan realisasi fisik dari 5 Laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022 berupa, 1 Laporan Arus Kas (LAK), 1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 1 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 1 Laporan Operasional (LO), dan 1 Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), sampai saat ini sementara dalam tahap penyusunan. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 41,29% dan realisasi keuangan sebesar 41,29%.
- 5) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.176.662.000,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.150.235.200,- dengan realisasi fisik dari 4 laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022 berupa laporan bahan tanggapan atas pemeriksaan oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Kota Makassar, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta aparat external auditor pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) , sampai saat ini ada 2 laporan yang telah dilaksanakan berupa bahan tanggapan Inspektorat Kota Makassar dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 85,04% dan realisasi keuangan sebesar 85,04%.
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.156.174.400,- sampai akhir bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.110.190.936,- dengan realisasi fisik dari 12 laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022 berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Fungsional Bendahara Pengeluaran per bulan, sampai saat ini telah dibuat 12 laporan bulanan Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 70.56%.

Adapun **faktor pendukung** dari kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran yang terencana dalam anggaran kas serta dukungan sumber daya pegawai yang cukup tersedia. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas. Untuk faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini adalah terhambatnya proses realisasi keuangan pada saat Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi Sipabaji dan terdapat beberapa

perbaikan oleh pejabat pengadaan yang perlu disesuaikan dengan regulasi, terdapat perubahan alokasi anggaran kas yang mengakibatkan adanya penyesuaian anggaran parsial. Dan Tindaklanjut yang disarankan untuk tahun selanjutnya akan mengantisipasi setiap perubahan yang ada baik dari sistem aplikasi yang berubah maupaun regulasi yang mengalami perubahan, serta memperkuat koordinasi kepada semua pemangku kepentingan khususnya proses pengelolaan keuangan daerah.

c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan, yakni:

- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.929.204.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 853.040.112,-, dengan realisasi fisik dari 8 Unit yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini sudah terlaksana 13 unit Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91.80.%.
- 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.623.185.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 1.141.656.000,- dengan realisasi fisik dari 4 paket yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini sudah terlaksana 4 paket. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 70.33%.

Adapun **faktor pendukung** dari kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran dalam bentuk penyediaan surat penyediaan dana (SPD) Di sisi lain faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini adalah proses pengadaan barang dan jasa yang masih bergulir , namun diharapkan telah terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2022.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.224.400.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 2.047.099.250,- dengan realisasi fisik dari 2192 Stel/Pasang yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sehingga sampai saat ini telah terealisasi 2133 Stel/Pasang. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 97.30% dan realisasi keuangan sebesar 92.03%.
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.922.500.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 560.265.613 ,- dengan realisasi fisik

dari 120 orang yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terlaksana 71 Orang. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 59.16% dan realisasi keuangan sebesar 60.73%.

Adapun **faktor pendukung** dari kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran dalam bentuk penyediaan surat penyediaan dana (SPD). Di sisi lain faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini adalah proses pengadaan barang dan jasa yang masih bergulir, namun diharapkan akan terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2022.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 (Lima) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.141.185.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp,915.240.924- dengan realisasi fisik dari 36 Jenis yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terlaksana 58 jenis. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi Fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 80.20%.
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.945.640.000,- sampai bulan Desember Tahun 2021 telah terealisasi sebesar Rp 695.982.270,- dengan realisasi fisik dari 30 jenis yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini yang terealisasi sebanyak 17 Jenis Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 56% dan realisasi keuangan sebesar 73.60%.
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 325.440.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp,117.990.000- dengan realisasi fisik dari 2112 Exlemper yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini yang terealisasi sebanyak 37.823 Exlemper Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 36.26%.
- 4) Fasilitas Kunjungan Tamu, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.18.967.500.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp18.842.305.135,- dengan realisasi fisik dari 500 Kunjungan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini terealisasi 910 kunjungan Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 182% dan realisasi keuangan sebesar 99.34%.

- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.314.000.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp847.391.025 dengan realisasi fisik dari 192 sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah teralisasi 162 orang. Sehingga untuk sub kegiatan Ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 84.37% dan realisasi keuangan sebesar 64.49%.

Adapun **faktor pendukung** dari kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran dalam bentuk penyediaan surat penyediaan dana (SPD). Di sisi lain faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini adalah proses pengadaan barang dan jasa yang masih bergulir, namun diharapkan akan terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2022.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 9.749.350.000.,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 8.945.336.118 ,- dengan realisasi fisik dari 20 Unit yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 27 Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 91.75%.
- 2) Pengadaan Mebel, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.4.742.644.500,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp,3.851.517.246.- dengan realisasi fisik dari 10 jenis yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 10 jenis. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 81.21%.
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.8.245.179.357,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.7.175.890.120,- dengan realisasi fisik dari 10 jenis yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 10 jenis. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 87.03%.

Adapun **faktor pendukung** dari kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran dalam bentuk penyediaan surat penyediaan dana (SPD). Di sisi lain faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini adalah proses pengadaan barang dan jasa yang masih bergulir, namun diharapkan akan terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2022.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 (Empat) sub kegiatan yaitu;

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.433.816.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 2.202.031.132,- dengan realisasi fisik dari 10500 Surat yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 7000 surat. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 66.67% dan realisasi keuangan sebesar 90.48%.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.999.907.032,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 3.795.355.162,- dengan realisasi fisik dari 12 Bulan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 12 bulan. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94.89%.
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.20.483.600.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 20.005.815.910,- dengan realisasi fisik dari 10 Jenis yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 9 jenis. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 90% dan realisasi keuangan sebesar 97.67%.
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.040.672.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 1.882.748.960,- dengan realisasi fisik dari 300 Orang yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 300 orang. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92.26%.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 (Lima) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Milik Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.118.772.794,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 885.780.803,- dengan realisasi fisik dari 10 Unit yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 10 unit. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik

hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 79.17%.

- 2) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.8.426.770.950,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.6.493.227.919,- dengan realisasi fisik dari 439 Unit yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 188 unit. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 42.14% dan realisasi keuangan sebesar 77.05%.
- 3) Pemeliharaan Mebel yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 96.700.000,- dengan realisasi fisik dari 3 Gedung yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 3 gedung sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96.70%.
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.420.216.500,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.1.181.532.876,- dengan realisasi fisik dari 6 Bangunan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 6 bangunan. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 83.19%.
- 5) Penyediaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.5.409.049.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.4.459.233.226,- dengan realisasi fisik dari 6 Bangunan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 6 bangunan. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 82.44%.

i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.180.208.720,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.175.856.988,- dengan realisasi fisik dari 14 bulan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini ada 14 Bulan (14 kali) yang terlaksana. Sehingga untuk sub kegiatan ini,

realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97.56%.

- 2) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.80.000.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.0,- dengan realisasi fisik dari 8 Orang yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini belum ada yang terlaksana. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 0% dan realisasi keuangan sebesar 0%.
- 3) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.569.804.509,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.2.286.965.300,- dengan realisasi fisik dari 12 Bulan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini ada 12 Bulan yang terlaksana. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 88.99% dan realisasi keuangan sebesar 88.99%.

Adapun **faktor pendukung** dari kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran yang terencana dalam anggaran kas serta dukungan sumber daya pegawai yang cukup tersedia. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas dan kewajiban negara kepada kepala daerah tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga wajib menganggarkan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000. Untuk faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini khususnya terjadi pada sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mana beliau belum berencana untuk menggunakan anggaran tersebut. Dan tindaklanjut yang disarankan untuk tahun selanjutnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga beliau sesuai peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan.

j. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) subbagian, yaitu:

- 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp7.948.365.500,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.7.538.458.775,- dengan realisasi fisik dari 1 Rumah yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terealisasi 1 rumah. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 94.84%.
- 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.4.719.511.000,- yang telah terealisasi sampai bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp 4.264.126.823,- dengan realisasi fisik

dari 1 Rumah yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terealisasi 1 rumah. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90.35%.

- 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.16.824.627.250,- yang telah terealisasi sampai bulan Desember Tahun 2022 sebesar Rp 16.025.979.257,- dengan realisasi fisik dari 1 Rumah yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini telah terealisasi 1 rumah. Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95.25%.

k. Penataan Organisasi

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.501.725.400,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 461.248.662,- dengan realisasi fisik dari 5 Dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini ada 5 Dokumen yang terlaksana yaitu dokumen Laporan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka penyederhanaan Struktur Organisasi berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Peraturan Walikota Makassar), Laporan Evaluasi Jabatan, Laporan Analisis Jabatan, Laporan Analisis Beban Kerja, dan Laporan Standar Kompetensi. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 91.93%.
- 2) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.169.191.200,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.1.120.384.445.- dengan realisasi fisik dari 5 Dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini ada 5 Dokumen yang terlaksana yaitu Laporan Pelayanan Proses Bisnis, Laporan Standar Operasional Prosedur (SOP), Laporan Pelayanan Publik, Laporan Survey Kepuasan Masyarakat dan Dokumen Tata Naskah Dinas Sehingga untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100.% dan realisasi keuangan sebesar 95.83%.
- 3) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.504.295.200,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 492.933.047,- dengan realisasi fisik dari 2 Dokumen yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini ada 2 Dokumen yang terlaksana yaitu Laporan SAKIP dan Laporan RB Sehingga untuk sub

kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 97.75%.

Adapun **faktor pendukung** dari kegiatan ini adalah Proses pelaksanaan kegiatan tetap terlaksana. Di sisi lain, adapun faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini adalah dukungan administrasi kegiatan maupun administrasi pengadaan barang dan jasa serta tindaklanjut yang disarankan yaitu diharapkan perlunya koordinasi yang intensif dengan para pengelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa. Adapun faktor penghambat dari kegiatan ini adalah Rendahnya realiasi keuangan disebabkan oleh beberapa hal, seperti :

- Keterlambatan proses pencairan pada bagian keuangan.
- Pelayanan publik juga telah melakukan monev ke beberapa skpd terkait pelayanan dalam hal inovasi masih kurangnya minat PNS melakukan inovasi , dan kendalanya masih kurangnya perhatian skpd melengkapi dokumen yg sesuai dengan pelayanan.
- masih kurangnya perhatian dan pemahaman kepala skpd terkait RB dan SAKIP.

Adapun tindak lanjut yang ditriwulan berikutnya yaitu, tetap aktif berkoordinasi dengan OPD untuk kelancaran realiasasi kegiatan.

I. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Fasilitasi Keprotokoleran, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.12.686.125.250,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 10.767.137.207,- dengan realisasi kinerja dari 840 Pelayanan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini ada 797 Pelayanan yang terlaksana dimana Fasilitasi Keprotokolan memiliki dua indikator kinerja, yaitu Jumlah Fasilitasi Akomodasi Pimpinan Daerah dalam hal ini pelayanan perjalanan dinas pimpinan dengan Capaian Kinerja pada Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 107 pelayanan atau 89.17% dan Jumlah Pelayanan Fasilitasi Keperotokoleran Pemerintah Kota Makassar yang Mendapat Layanan Keprotokoleran dengan Capaian Kinerja pada Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 690 pelayanan atau 95.83%, sehingga untuk sub kegiatan ini, rata-rata realisasi kinerja hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 92.50% dan realisasi keuangan sebesar 84,87%.
- 2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dalam hal ini jumlah fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan mencakup kesiapan bahan pendukung (sambutan/materi) Pimpinan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.432.351.800,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 429.900.896,- dengan realisasi kinerja dari 320 Pelayanan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini ada 311 Pelayanan yang

terlaksana. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi kinerja hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 97,19% dan realisasi keuangan sebesar 99,43%.

- 3) Pendokumentasian Tugas Pimpinan, dalam hal ini jumlah pendokumentasian kegiatan/tugas pimpinan daerah yang dilaksanakan mencakup pelaksanaan kerja sama media pimpinan serta segala pelaksanaan kegiatan pimpinan yang didokumentasikan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.12.460.814.800,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 10.868.450.192,- dengan realisasi fisik dari 240 Pelayanan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, sampai saat ini ada 217 Pelayanan yang terlaksana. Sehingga untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 90,42% dan realisasi keuangan sebesar 87,22%.

Adapun **faktor pendukung** dari kegiatan ini adalah Ketersediaan dana serta kerjasama pimpinan dan staf yang tetap efektif dalam menjalankan pelayanan keprotokoleran dan komunikasi pimpinan. Di sisi lain faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini adalah adanya rekening belanja yang belum bisa kami cairkan dan belum terealisasi sepenuhnya hingga akhir triwulan IV Tahun 2022 , sehingga tindak lanjut yang disarankan untuk mempercepat kegiatan ini yaitu mengoptimalkan percepatan penyerapan anggaran untuk jenis belanja lainnya

3. PROGRAM PEMERINTAHAN DAERAH & KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program ini terdiri dari 4 (Empat) Kegiatan yaitu Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum serta Fasilitasi Kerjasama Daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan kedalam sub-sub kegiatan sebagai Berikut:

a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang didukung oleh 3 Sub Kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penataan Administrasi Pemerintahan.

Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan sebelum anggaran perubahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.714.186.800 akan tetapi setelah adanya anggaran perubahan Tahun 2022, alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan sebesar Rp. 345.502.200 dengan realisasi anggaran Rp285.810.544 atau 82,72%. Rata-rata capaian kinerja termasuk dalam kategori tinggi.

Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan terdiri dari sub kegiatan.

Adapun factor penghambat dan **factor pendukung** pelaksanaan kegiatan pada Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan Kota Makassar selama Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan, yaitu tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan, yaitu ;
 - ada beberapa kegiatan yang anggarannya dialihkan ke anggaran perubahan sehingga harus menunggu pengesahan DPA Perubahan Tahun 2022.
 - Pada Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan ada 2 (dua) indikator capaian kinerja yang harus dicapai. Namun DPA tahun 2022 terdapat 4 Header, sehingga pada triwulan I sudah ada pencairan anggaran namun belum ada laporan kegiatan. Anggaran yang cair pada triwulan I adalah pencairan Belanja Jasa Tenaga Administrasi.
 - Salah satu indikator capaian kinerja pada Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan ditetapkan sebanyak 4 (empat) laporan. Namun yang seharusnya hanya ada satu laporan kegiatan karena hanya ada 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan rapat.
 - Ada beberapa anggaran yang tidak terealisasi yaitu belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp 50.406.756,00 yang merupakan sisa dari pembayaran Jasa Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas yang dianggarkan untuk 12 orang namun yang ada hanya 9 orang.
 - Selain itu belanja lainnya yang tidak terealisasi adalah belanja cetak/fotocopy sebesar Rp 6.284.000,00 untuk kegiatan Ketatausahaan dan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan karena sudah tersedia mesin fotocopy di ruangan.

2) Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan sebelum anggaran perubahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.042.580.000,00 akan tetapi setelah adanya anggaran perubahan Tahun 2022, alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan sebesar Rp 1.181.552.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 1.056.375.130,00 atau 89,41%. Rata-rata capaian kinerja termasuk dalam kategori tinggi. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan terdiri dari 7 sub kegiatan.

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Kota Makassar selama Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

2. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan yaitu;

- Ada beberapa kegiatan yang anggarannya dialihkan ke anggaran perubahan sehingga harus menunggu pengesahan DPA Perubahan Tahun 2022.
- Salah satu indikator capaian kinerja pada Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan yaitu Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan Penegasan Batas Wilayah ditetapkan sebanyak 42 (empat puluh dua) Kecamatan/Kelurahan. Namun yang dapat terealisasi/terlaksana hanya 20 (dua puluh) Kelurahan yang ada di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate.
- Jumlah target indikator capaian kinerja yang semula 42 Kecamatan Kelurahan tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran yang diberikan pada saat asistensi yang hanya dianggarkan untuk 2 (dua) kecamatan sehingga hanya 20 Kelurahan yang dapat dilakukan Penegasan Batas Wilayahnya, namun tidak dirubah target capaiannya menjadi 2 Kecamatan, 20 Kelurahan setelah asistensi DPA Tahun 2022.
- Belanja Perjalanan Dinas yang tidak terealisasi karena anggaran Perjalanan Dinas yang tersisa atau belum digunakan hanya untuk Golongan IV sementara jumlah golongan IV di Bagian Tata Pemerintahan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah golongan III.
- Adanya aturan terkait pembatasan jumlah penerima honorarium pada setiap kegiatan yaitu hanya 10 orang disetiap kegiatan sementara dalam DPA tahun 2022 dianggarkan sebanyak 14 orang disetiap kegiatan.
- Selain itu belanja lainnya yang tidak terealisasi adalah belanja cetak/fotocopy sebesar Rp 6.284.000,00 untuk kegiatan Ketatausahaan dan kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan karena sudah tersedia mesin fotocopy di ruangan.

3) Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah sebelum anggaran perubahan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.427.842.400,00 akan tetapi setelah adanya anggaran perubahan Tahun 2022, alokasi anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah sebesar Rp 1.657.555.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 1.257.846.313,00 atau 75,89%. Rata-rata capaian kinerja termasuk dalam kategori tinggi.

Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah terdiri dari 8 sub kegiatan.

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pada Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Makassar selama Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
2. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan yaitu:
 - Ada beberapa kegiatan yang anggarannya dialihkan ke anggaran perubahan sehingga harus menunggu pengesahan DPA Perubahan Tahun 2022.
 - Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah ada beberapa anggaran yang tidak cair diantaranya belanja Aplikasi Cini LPPD ta Rp 150.000.000,00 namun yang diambil hanya Rp. 100.000.000,00 dan hasil nego Rp 97.236.000 sehingga masih tersisa Rp.52.764.000,00.
 - Demikian pula halnya belanja Pengembangan SIM LPPD Rp 50.000.000,00 yang tidak dapat terealisasi pada anggaran perubahan karena dalam anggaran pokok sudah ada anggaran pemeliharaan SIM LPPD.
 - Belanja Perjalanan Dinas yang tidak terealisasi karena anggaran Perjalanan Dinas yang tersisa atau belum digunakan hanya untuk Golongan IV sementara jumlah golongan IV di Bagian Tata Pemerintahan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah golongan III.
 - Adanya aturan terkait pembatasan jumlah penerima honorarium pada setiap kegiatan yaitu hanya 10 orang disetiap kegiatan sementara dalam DPA tahun 2022 dianggarkan sebanyak 14 orang disetiap kegiatan

b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.57.242.665.200,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.53.700.755.595,- dengan realisasi fisik dari 22 kegiatan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 93.81% dan realisasi keuangan sebesar 93.81%.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.529.183.200,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.423.016.734,- dengan realisasi fisik dari 5 Kebijakan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 79.94% dan realisasi keuangan sebesar 79.94%.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.472.472.200,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.151.864.216,- dengan

realisasi fisik dari 5 Kebijakan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 32.14 % dan realisasi keuangan sebesar 32.14%.

Adapun **faktor pendukung** dari kegiatan ini adalah Ketersediaan dana dan intensnya koordinasi antara pimpinan dan staf. Di sisi lain, faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini adalah adanya beberapa Kegiatan yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat umum (pekerja keagamaan) yang mengharuskan menggunakan rekening bank sulselbar yang dimana tidak semua pekerja keagamaan tersebut memiliki rekening yang dimaksud serta keterlambatan administrasi proses pencairan dokumen keuangan. Dan tindak lanjut yang disarankan untuk mempercepat proses administrasi tersebut adalah perlunya koordinasi yang intensif dari pejabat serta koordinasi dengan para pengelola keuangan.

c. Fasilitas dan Koordinasi Hukum

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

1) Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.645.361.500,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 1.201.910.188,- dengan realisasi kinerja dari 120 Produk Hukum yang ditargetkan sampai triwulan keempat sebanyak 93 Produk Hukum tahun 2022, untuk sub kegiatan ini realisasi kinerja hingga bulan desember tahun 2022 sebesar 77.5% dan realisasi keuangan sebesar 73.05%.

Adapun **faktor pendukung** dalam Kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum daerah adanya kerjasama dengan unsur Tenaga Ahli Selaku Narasumber , SKPD terkait selaku pengusul dan Percepatan Fasilitas di Biro Hukum Pemprov Sul-Sel, sehingga proses tetap berjalan. Faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini adalah dukungan administrasi kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa mengalami keterlambatan. Dan tindak lanjut yang disarankan untuk Mempercepat proses administrasi tersebut adalah perlunya koordinasi yang intensif dengan para pengelola keuangan dan pengadaan barang dan jasa.

2) Fasilitas Bantuan Hukum

Fasilitas Bantuan Hukum yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.082.472.200,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 900.181.588,- dengan realisasi kinerja dari 12 Perkara yang ditargetkan untuk saat ini sampai triwulan keempat sebanyak 12 perkara tahun 2022, untuk sub kegiatan ini realisasi kinerja hingga bulan desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 83.16%.

Adapun **faktor pendukung** dalam Kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan kegiatan penanganan perkara adanya kerjasama dengan unsur Advokasi sebagai tim narasumber dan unsur dari pihak tim ahli dalam setiap penanganan perkara terhadap Pemerintah Kota Makassar dan dengan berkolaborasi bersama SKPD terkait, sehingga proses kegiatan tetap berjalan. Di sisi lain, Faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini adalah kurangnya bukti surat pendukung dan tidak adanya anggaran saksi-saksi ahli dalam penanganan perkara asset pemerintah kota makassar Dan tindaklanjut yang disarankan untuk Mempercepat proses administrasi tersebut adalah perlunya koordinasi yang intensif.

3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 607.900.500,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 547.131.034,- dengan realisasi kinerja dari 120 Produk Hukum yang ditargetkan untuk saat ini sampai triwulan keempat sebanyak 93 Produk Hukum sampai berakhirnya tahun 2022, untuk sub kegiatan ini realisasi kinerja hingga bulan desember tahun 2022 sebesar 77.5 % dan realisasi keuangan sebesar 90.00%.

Adapun **faktor pendukung** dalam Kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan rapat, proses penyebarluasan Produk Hukum dan kegiatan tetap berjalan. Di sisi lain, Faktor penghambat dari pencapaian kegiatan ini adalah target 120 produk hukum tidak dapat terpenuhi dikarenakan sesuai usulan dari SKPD ke Bagian Hukum untuk difasilitasi sebanyak 93 produk hukum dan semuanya sudah terealisasi. dan tindaklanjut yang disarankan untuk Mempercepat proses administrasi tersebut adalah perlunya koordinasi yang intensif.

d. Fasilitasi Kerjasama Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.4.294.191.400,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.3.301.761.516,- dengan realisasi fisik dari 20 Dokumen Kerjasama yang ditargetkan sampai triwulan keempat dan telah tercapai 49 Dokumen Kerjasama tahun 2022, serta terlaksananya Rapat Kerja Teknis Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernis APEKSI) yang penambahannya masuk dalam DPA Perubahan Bagian Kerjasama TA. 2022, untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 76.89%.
- 2) Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.6.169.031.400,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.3.865.264.431,- dengan realisasi fisik dari 2 Dokumen Kerjasama

yang ditargetkan sampai triwulan keempat telah tercapai 4 dokumen kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Lembaga Luar Negeri yakni :

- Pernyataan Lehendak antara Pemerintah Kota Makassar dengan The Spectrum Solutions Group (TSSG) Tentang Pembuatan Cetak Biru (Blueprint) Ekonomi berbasis Kemaritiman (Blue Ekonomi) Kota Makassar;
- Rencana Kegiatan Tahunan melalui Perjanjian Pelaksanaan Hibah antara Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia tentang Program Air Minum, Sanitasi, Persampahan dan Hiegiene Perkotaan untuk program : USAID Clean Cities Blue Ocean (USAID CCBO);
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar Indonesia dan Singapore Cooperation Enterprise tentang Hibah Temasek Foundation untuk Temasek Foundation – Singapore Cooperation Enterprise : Program Smart City berkelanjutan di Indonesia;
- Note of Collaboration between City of Makassar and Asian Development Bank.

Adapun 2 Forum yang di targetkan sampai triwulan keempat terlaksana hanya 1 Forum yakni Makassar Investment Forum tahun 2022, untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 85 %dan realisasi keuangan sebesar 62.66%.

- 3) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.722.164.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.378.429.121,- dengan realisasi fisik dari 2 Laporan Pelaksanaan Kerjasama dan Evaluasi Kerjasama serta 100 lembar buku potensi kerjasama sampai dengan triwulan keempat telah tercapai 2 laporan dan untuk pembuatan buku potensi kerjasama tidak dapat direalisasikan sampai berakhirnya tahun 2022, untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 80 % dan realisasi keuangan sebesar 52.40%.

Adapun **faktor pendukung** dari Kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran yang cukup, kerjasama pimpinan dan staf yang efektif serta koordinasi yang intensif dengan calon mitra/mitra kerjasama dan stakeholder lainnya. Adapun tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya adalah mengantisipasi hal-hal yang menjadi kekurangan di tahun sebelumnya dengan mempersiapkan SDM yang ada mampu memahami dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan serta tetap aktif berkoordinasi baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassar.

4. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Program ini terdiri dari 3 (Tiga) Kegiatan, yaitu Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan serta Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa. Kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 3.277.900.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 1.812.181.701,- dengan realisasi fisik dari 12 Bulan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022 untuk sub kegiatan ini, realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 56,14% dan realisasi keuangan sebesar 56,14%.
- 2) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 692.516.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 472.495.075,- dengan realisasi fisik dari 12 Laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022 sampai saat untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 68,23% dan realisasi keuangan sebesar 68,23%.
- 3) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 748.106.000,- sampai bulan Desember Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 485.107.681,- dengan realisasi fisik dari 12 Laporan yang ditargetkan sampai berakhirnya tahun 2022, untuk sub kegiatan ini realisasi fisik hingga bulan Desember tahun 2022 sebesar 64,84% dan realisasi keuangan sebesar 64,84%.

Adapun **faktor pendukung** dari program ini adalah kerjasama pimpinan dan staf yang efektif dalam menjalankan kegiatan yang dilaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan BUMD/BLUD dan stakeholder lainnya yang terjalin dengan baik. Sedangkan faktor penghambat masih rendahnya SDM aparat pelaksanaan dalam pemahaman tugas pokok dan fungsinya dan beban tugas yang akan dikerjakan dan juga keterlambatan pencairan anggaran kas dan kelengkapan dokumen pendukung.

Faktor penghambat lainnya adalah dimana masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada bagian perekonomian, salah satu program prioritas pemerintahan kota yang penganggarnya cukup besar yaitu pembentukan Makassar Incorporate yang masih menunggu hasil kajian dari kementerian terkait. Masih belum optimalnya koordinasi yang dilakukan beberapa SKPD terkait dalam mempedomani dan realisasi sasaran yang akan dilaksanakan.

Dan tindak lanjut yang disarankan yakni agar pencairan dana kegiatan dapat dipercepat sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, dan

melakukan koordinasi dengan instansi internal dan eksternal guna mengoptimalkan pencapaian target dan realisasi perencanaan serta mendayagunakan sumber daya manusia dan aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempercepat kelengkapan berkas yang akan di ajukan serta mengoptimalkan koordinasi komitmen SKPD dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan.

b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 414.710.100,- telah terealisasi sebesar Rp. 358.926.954,- atau sebesar 86.55%. Adapun target realisasi kinerja yang direncanakan adalah 1 dokumen penyusunan program pembangunan yang difasilitasi dan telah terealisasi kinerja 1 Dokumen.
- 2) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 342.686.900,- telah terealisasi sebesar Rp 300.654.958,- atau sebesar 87.73%. Adapun target kinerja yang direncanakan adalah 1 dokumen penyusunan program pembangunan yang dikendalikan dan dievaluasi. Dokumen yang dimaksud adalah laporan monitoring realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilaksanakan melalui aplikasi SISMONDAK selama 4 Triwulan (1 Tahun). Pelaporan DAK telah terlaksana sampai dengan Triwulan IV sehingga realisasi target kinerja telah mencapai 100%.
- 3) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 313.868.400,- telah terealisasi sebesar Rp 275.036.910,- atau sebesar 87.63%. Adapun target kinerja yang direncanakan adalah 100% SKPD yang mengisi laporan evaluasi dan pengawasan anggaran pada aplikasi SISMONTEPRA tepat waktu selama 12 Bulan (1 Tahun). Pelaporan SISMONTEPRA telah terlaksana hingga bulan Desember dengan persentase jumlah SKPD yang melaporkan tepat waktu adalah 100%, sehingga realisasi target kinerja telah mencapai 100%.

Adapun **faktor pendukung** dari Kegiatan ini adalah koordinasi-koordinasi yang intensif baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassar. Adapun tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya adalah mengantisipasi hal-hal yang menjadi kekurangan di tahun sebelumnya dengan mempersiapkan SDM yang ada mampu memahami dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan serta tetap aktif berkoordinasi baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassar.

c. Pengelolaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu

- 1) Pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.977.864.200,- dengan realisasi keuangan sampai dengan bulan Desember sebesar Rp 1.646.434.202,- atau sebesar 83.24 %, dengan target kinerja yaitu Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilayani sebanyak 200 paket selama 1 tahun dengan capaian sampai dengan bulan Desember 2022 yaitu sebanyak 285 paket yang telah dilayani dengan capaian kinerja sebesar 143%.
- 2) Pengelolaan Layanan pengadaan secara elektronik yang didukung oleh anggaran sebesar 1.455.956.000,- dengan realisasi keuangan samapai bulan Desember 2022 sebesar Rp 1.187.220.534,- atau sebesar 81.54%. Dengan target kinerja yaitu Jumlah Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Dilaksanakan sebanyak 7 fungsi layanan dengan capaian sampai dengan bulan Desember 2022 sudah dilaksanakan sebanyak 7 fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ,dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang didukung oleh anggaran sebesar Rp 2.996.096.000,- dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp 1.499.403.735 ,- atau sebesar 50.05 % Dengan target kinerja pertama yaitu Jumlah bimbingan teknis / Sosialisasi yang dilaksanakan sebanyak 14 Bimtek dengan realisasi capaian sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 17 bimtek telah dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 121%, dan target kinerja kedua yaitu Jumlah SKPD Yang meminta untuk mendapatkan Pendampingan Pengadaan Barang/jasa sebanyak 15 SKPD dengan capaian sampai dengan bulan Desember 2022 ada 17 SKPD yang telah mendapatkan pendampingan dalam hal pengadaan barang/jasa dengan capaian kinerja sebesar 113%.

Adapun **faktor pendukung** pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya alokasi anggaran yang cukup serta terencana dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tersusun dengan baik. Dengan didukung oleh sumber daya Pegawai yang cukup tersedia. Adapun faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah adanya alokasi anggaran yang tidak terealisasi untuk sisa tahun anggaran 2022 yaitu pada pembiayaan Lembaga Pemantau Independen pengadaan Barang/Jasa (LPI-PBJ) yang mana pada tahun 2022 telah berakhir masa kerjanya. Selain itu ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena belum ada petunjuk lebih lanjut dari instansi terkait (LKPP)

- b) Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2021 dan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	% REALISASI	
			Tahun 2021	Tahun 2022
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	100%	60,37	81,64
	Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10 Kebijakan/ 100%	89,85	93,74
	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah	100%	68,59	79,42
	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	100%	78,64	67,46
	Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik	100%	66,56	59,33
	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	12 Kegiatan/ 100%	87,75	87,24
	Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	3 level	54,26	73,37
	Terselenggaranya Kegiatan kegiatan Kelembagaan	153 Kelurahan/ 100%	76,16%	83,50
Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	90,44%	66,45
	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan	18 Dokumen	95,42%	80,75
	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	50,87%	87,03
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	84,77%	78,15
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	48,11%	82,86
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	82,31%	94,20
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	89,93%	87,84
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94,00%	96,30
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	58,10%	79,62
	Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	91,53%	94,36
	Terlaksananya Penataan Organisasi	100%	82,88%	96,41
	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	100%	80,19%	86,26

Penjelasan Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Capaian dari indikator Terlaksananya Administrasi Pemerintahan tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (21,27%).
2. Capaian dari indikator Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (3,89%).
3. Capaian dari indikator Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (10,83%).

4. Capaian dari indicator Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (11,18%).
5. Capaian dari indicator Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (7,23%).
6. Capaian dari indicator Terlaksananya Administrasi Pembangunan tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (0,51%).
7. Capaian dari indicator Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (19,11%).
8. Capaian dari indicator Terselenggaranya Kegiatan-kegiatan Kelembagaan tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (7,34%).
9. Capaian dari indicator Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022 mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (23,99%).
10. Capaian dari indicator Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (14,67%).
11. Capaian dari indicator Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (36,16%).
12. Capaian dari indicator Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (6,62%).
13. Capaian dari indicator Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (34,75%).
14. Capaian dari indicator Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (11,89%).
15. Capaian dari indicator Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (2,69%).
16. Capaian dari indicator Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (2,3%).
17. Capaian dari indicator Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (21,52%).
18. Capaian dari indicator Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (2,83%).
19. Capaian dari indicator Terlaksananya Penataan Organisasi tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar (13,53%).
20. Capaian dari indicator Terlaksananya Fasilitasi Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar (6,07%).

Dari penjelasan diatas bahwa, apabila dirata-ratakan antara kenaikan dan penurunan Indikator Capaian Kinerja maka tetap akan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 65,71% dari tahun sebelumnya.

c) Perbandingan Kinerja s/d Periode RPJMD/RENSTRA dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Kinerja s/d Periode RPJMD/RENSTRA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	% REALISASI		TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA
			Tahun 2021	Tahun 2022	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	100%	60,37	81,64	-78,32
	Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10 Kebijakan (100%)	89,85	93,74	-11,43
	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah	100%	68,59	79,42	-78,94
	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	100%	78,64	67,46	-66,86
	Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik	100%	66,56	59,33	-84,67
	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	12 Kegiatan (100%)	87,75	87,24	-84,40
	Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	3 level	54,26	73,37	-73,13
	Terselenggaranya Kegiatan-kegiatan Kelembagaan	153 Kelurahan (100%)	76,16%	83,50	-63,27
	Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	90,44%	66,45
Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan		18 Dokumen	95,42%	80,75	-73,06
Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	50,87%	87,03	-79,07
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	84,77%	78,15	-79,39
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	48,11%	82,86	-84,81
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	82,31%	94,20	-31,76
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	89,93%	87,84	-41,62

Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94,00%	96,30	-49,61
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	58,10%	79,62	-66,32
Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	91,53%	94,36	-37,77
Terlaksananya Penataan Organisasi	100%	82,88%	96,41	-67,22
Terlaksananya Fasilitas Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	100%	80,19%	86,26	-71,77

Dari tabel Perbandingan Kinerja s/d Periode RPJMD/RENSTRA bahwa, untuk dapat mencapai target Indikator Capaian Kinerja sampai tahun akhir RPJMD/Renstra maka, masih terdapat kekurangan capaian kinerja dengan rata-rata sebesar (65,71%).

d) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional.

Apabila disusun perbandingannya antara realisasi kinerja Sekretariat daerah Kota Makassar dengan realisasi nasional, maka tidak terdapat tabel yang dapat disajikan, dikarenakan realisasi kinerja pada Sekretariat Daerah tidak diukur secara nasional.

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2022 tidak dapat disajikan.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN %	REALISASI NASIONAL %	
1	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan kelembagaan	Terselenggaranya pembinaan kelembagaan PKK	153 Kelurahan	100%	93,22	75,54	-
		Terselenggaranya pembinaan LPM dan peningkatan peran kelembagaan dalam kegiatan pengembangan keuangan	153 Kelurahan	100%	69,67	74,53	-
		Terselenggaranya sayembara dan pembinaan kelompok TTG	15 Kelompok	100%	95,50	84,56	-
2	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100%	74,67	64,42	-
		Tersedianya dokumen RKA yang tersusun	60 Dokumen		74,03	35,33	
		Tersedianya dokumen DPA yang tersusun	60 Dokumen	100%	51,53	29,35	-
		Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	12 Kegiatan	100%	55,00	48,34	-
		Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	100%	39,00	30,06	-

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI %	CAPAIAN %	REALISASI NASIONAL %
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	12 Bulan	100%	81,82	92,26	-
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	12 Bulan	100%	68,32	89,07	-
		Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi yang disiapkan	100 %	100%	73,68	92,11	-
		Tersedianya Anggaran Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	6 Laporan	100%	41,29	61,21	-
		Tersedianya Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	10 Kegiatan	100%	85,04	85,05	-
		Terselenggaranya Penatausahaan Pelaporan yang dilaksanakan	12 Kegiatan	100%	70,56	85,04	-
		Tersedianya Anggaran Pelaporan Prognosis Realisasi yang disusun	1 Laporan	100%			-
		Tersedianya Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	12 Bulan	100%	97.56	79,54	-
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diadakan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil	66 Stel/ Pasang	100%			-
		Tersedianya Pimpinan dan Keluarga yang mendapatkan Jasa Perawatan Kesehatan (medical check up)	8 Orang	100%	-	-	-
		Tersedianya Bulan Penyediaan Dana BOP KDH/WKDH	12 Bulan	100%	88,99	45,69	-
3	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Yang disusun	1 Laporan	100%		79,18	-
		Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	100%	70.33	100,00	-
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	2192 Stel/ Pasang	100%	92.03	97.30	-
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan gedung yang diadakan	36 Jenis	100%	80.20	100,00	-
		Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	30 Jenis	100%	73.60	56,00	-
		Tersedianya Bahan Bacaan yang disediakan	2112 Exlemper	100%	36.26	100,00	-
		Terselenggaranya Kunjungan Tamu Pemerintah Kota Makassar	200 Kunjungan	100%	99.34	182,00	-
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	141 Perjalanan	100%	64.49	84.37	-
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	2 Unit	100%			-
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang diadakan	Unit	100%	100,00	91.75	-
		Tersedianya Mebel yang diadakan	10 Jenis	100%	81.21	100,00	-
		Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan	17 Jenis	100%	87.03	86,08	-
		Tersedianya Surat Masuk dan Surat Keluar yang tersedia	10500 Surat	100%	90.48	66.67	-
		Tersedianya Penyediaan Kebutuhan Jasa Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	100%	94.89	100,00	-
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	10 Jenis	100%	97.67	90,00	-
		Tersedianya Tenaga Kebersihan yang terlibat dalam kebersihan kantor	300 Orang	100%	92.26	100,00	-
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang pajaknya diperpanjang dan dipelihara	10 Unit	100%	79.17	100,00	-
		Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang pajaknya dibayar dan dipelihara	439 Unit	100%	77.05	42.14	-
		Tersedianya Mebel yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	3 Gedung	100%	96.70	100,00	-

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN %	REALISASI NASIONAL %	
		Tersedianya Bangunan/Gedung yang Peralatan dan Mesinnya mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	6 Bangunan	100%	83.19	100,00	-
		Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	6 Bangunan	100%	82.44	100,00	-
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Rumah	100%	94.84	100,00	-
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 Rumah	100%	90.35	100,00	-
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Rumah	100%	95.25	100,00	-
4	Terlaksananya penataan administrasi	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan yang dilaksanakan	5 Dokumen	100%	91.93	100,00	-
		Tersedianya Dokumen Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang dilaksanakan	4 Dokumen	100%	95.83	100,00	-
		Tersedianya Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	2 Dokumen	100%	97.75	100,00	-
5	Terlaksananya fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan Pemerintah Kota Makassar	Terselenggaranya Pelayanan Fasilitasi Keprotokolan Pemerintah Kota Makassar yang mendapat layanan Keprotokoleran	840 Pelayanan	100%	84.87	92.50	-
		Terselenggaranya Fasilitasi, Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan	320 Pelayanan	100%	99.43	97.19	-
		Terselenggaranya Pendokumentasian Kegiatan/Tugas Pimpinan Daerah yang dilaksanakan	240 Dokumen	100%	87.22	90.42	-
6	Terlaksananya administrasi Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen				
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	4 Laporan				
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	4 Kegiatan	100%	82.72	56.04	-
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi Forum Komunikasi, Pimpinan Daerah dengan Instansi/Lembaga/Perangkat Daerah	12 Kegiatan				
		Terselenggaranya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan	2 Laporan				
		Terselenggaranya Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan pembinaan wilayah	5 Kecamatan/ Kelurahan				
		Terselenggaranya Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan batas wilayah	42 Kecamatan/ Kelurahan				
		Terselenggaranya Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan Fasilitasi toponimi dan Pemetaan wilayah	168 Kecamatan/ Kelurahan				
		Tersedianya dokumen penetapan kode dan data Kewilayahan	1 Laporan	100%	89.41	138,00	-
		Tersedianya Keputusan Pelimpahan kewenangan Walikota pada Camat	4 Dokumen				
		Terselenggaranya Kelurahan yang dilakukan pemantapan penyelenggaraan dana Kelurahan	153 Kelurahan				
		Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	15 Laporan				

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN %	REALISASI NASIONAL %	
		Tersedianya Dokumen Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Dokumen	100%	75.89	136.62	-
		Tersedianya Laporan Hasil Pengukuran standar Pelayanan Minimal	1 Laporan				
		Jumlah usul dan Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah	4 Dokumen				
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah	1 Laporan				
		Tersedianya Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 Laporan				
7	Terlaksananya dan dievaluasinya kebijakan kesejahteraan rakyat	Terselenggaranya Pengelolaan Bina Mental Spiritual Yang Difasilitasi	20 Kegiatan	100%	93.81	93.81	-
		Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Dievaluasi	5 Kebijakan	100%	79.94	79.94	-
		Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Sosial yang Dievaluasi	5 Kebijakan	100%	32.14	32.14	-
8	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan daerah	Terselenggaranya Penyusunan Produk Hukum yang Difasilitasi	10 Ranperda	100%	73.05	77.05	-
		Terselenggaranya Penanganan Perkara terhadap Pemerintah Kota Makassar	12 Perkara	100%	83.16	100,00	-
		Terselenggaranya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	400 Produk Hukum	100%	90,00	77.05	-
9	Terlaksananya fasilitasi kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri	Tersedianya Dokumen Kerjasama Dalam Negeri Yang Ditandatangani	20 Dokumen	100%	76.89	100,00	-
		Tersedianya Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang Mempunyai Rekomendasi dari Tim Koordinasi	20 Dokumen				
		Terselenggaranya Kesepakatan Kerjasama yang Tercapai	20 Dokumen				
		Terselenggaranya Forum Investasi Luar Negeri	1 Forum Kerjasama	100%	62.66	85,00	-
		Tersedianya Potensi Kerjasama Investasi yang diinventarisir Luar Negeri	1 Dokumen Kerjasama				
		Tersedianya MoU yang ditindaklanjuti menjadi Perjanjian Kerjasama	1 Laporan	100%	52.40	80,00	-
		Buku Potensi Kerjasama	100 Eksemplar				
		Tersedianya Laporan dan Data Kerjasama Secara Berkala yang Didokumentasikan	1 Laporan				
		Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	1 Laporan				
10	Terlaksananya kebijakan perekonomian	Tersedianya Dokumen/Laporan Kinerja Manajemen BUMD	5 BUMD	100%	56.14	56.14	-
		Tersedianya Dokumen/Laporan Kinerja Manajemen BLUD	20 BLUD				
		Assesment BUMD/BLUD	1 Kegiatan				
		Terselenggaranya Peserta kegiatan sosialisasi / FGD / Bimtek / Rapat koordinasi	160 Orang				
		Kajian Pengelolaan BUMD/BLUD	3 Kajian				
		Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan BUMD (Coorporate Plan) RKAP BUMD	6 BUMD				
		Penataan total BUMD	2 Kegiatan				
		Tersedianya Laporan Evaluasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	100%	68.23	68.23	-
		Terselenggaranya Peserta Sosialisasi/Bintek/FGD Perencanaan dan Pengendalian Perekonomian	160 Orang				
		Terselenggaranya rapat koordinasi TPID	2 Kegiatan				
		Tersedianya Dokumen/Laporan Evaluasi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Laporan	100%	64.84	64.84	-
		Terselenggaranya Peserta Sosialisasi/Bintek/FGD Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Kajian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi	160 Orang				
		Terselenggaranya rapat koordinasi TPKAD	2 Kegiatan				

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI %	CAPAIAN %	REALISASI NASIONAL %
11	Terlaksananya administrasi pembangunan	Tersedianya Dokumen Penyusunan Program Pembangunan yang Difasilitasi	1 Dokumen	100%	86.55	85,94	-
		Tersedianya Dokumen Program Pembangunan yang Dikendalikan dan Dievaluasi	1 Dokumen	100%	87.73	87,12	-
		Tersedianya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	1 Dokumen	100%	87.63	90,45	-
12	Terlaksananya manuritas/kematangan unit kerja pengadaan barang dan jasa	Tersedianya Paket Pra Tender Pemerintah Kota Makassar Diverifikasi	300 Paket	100%	86.55	100,00	-
		Tersedianya Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah yang Dilayani	300 Paket				
		Asistensi Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup)	7 Fungsi Layanan	100%	87.73	100,00	-
		Tersedianya Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dilaksanakan	7 Fungsi Layanan				
		Tersedianya Laporan Evaluasi Pengembangan Penyerapan Anggaran Kota Makassar	12 Laporan	100%	87.63	100,00	-
		Tersedianya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Makassar yang Dipantau	300 Paket				
		Terselenggaranya Peserta Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	124 Orang				
		Terselenggaranya Peserta Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	248 Orang				
Terselenggaranya Peserta Sosialisasi peraturan Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	248 Orang						
Terselenggaranya Peserta Bimbingan Operasional Aplikasi Sistem Pengandaan Secara Elektronik	140 Orang						

e) Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
			CAPAIAN KINERJA %	ALOKASI (RP)	CAPAIAN ANGGARAN (RP)	CAPAIAN ANGGARAN (%)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	100%	60,37	3.184.609.200	2.600.031.987	81,64
	Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10 Kebijakan/ 100%	89,85	58.244.320.600	54.596.244.529	93,74
	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah	100%	68,59	3.335.734.200	2.649.222.810	79,42
	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	100%	78,64	11.185.386.800	7.545.455.068	67,46
	Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik	100%	66,56	4.668.552.000	2.769.784.457	59,33
	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	12 Kegiatan/ 100%	87,75	1.071.265.400	934.618.822	87,24
	Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	3 level	54,26	6.429.916.200	4.717.645.171	73,37
	Terselenggaranya Kegiatan kegiatan Kelembagaan	153 Kelurahan/ 100%	76,16%	24.338.451.900	20.323.342.733	83,50

Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	90,44%	336.189.300	223.385.991	66,45
	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan	18 Dokumen	95,42%	38.762.850.558	31.300.477.676	80,75
	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	50,87%	2.830.013.229	2.462.822.288	87,03
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	84,77%	2.552.389.000	1.994.696.112	78,15
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	48,11%	3.146.900.000	2.607.364.863	82,86
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	82,31%	22.737.173.857	21.418.909.354	94,20
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	89,93%	22.737.173.857	19.972.743.484	87,84
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94,00%	28.957.995.032	27.885.951.164	96,30
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	58,10%	16.474.809.244	13.116.474.824	79,62
	Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	91,53%	29.492.503.750	27.828.564.755	94,36
	Terlaksananya Penataan Organisasi	100%	82,88%	2.151.839.000	2.074.566.154	96,41
	Terlaksananya Fasilitas Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	100%	80,19%	25.579.291.850	22.065.488.295	86,26

- f) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			CAPAIAN KINERJA %	PENYERAPAN ANGGARAN (RP)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan	100%	60,37	81,64	18,36
	Terlaksananya dan di Evaluasinya kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10 Kebijakan/ 100%	89,85	93,74	6,26
	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Kebijakan Daerah	100%	68,59	79,42	20,58
	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	100%	78,64	67,46	32,54
	Tersedianya Rumusan Kebijakan Perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik	100%	66,56	59,33	40,67
	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	12 Kegiatan/ 100%	87,75	87,24	12,76
	Manuritas/Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	3 level	54,26	73,37	26,63
	Terselenggaranya Kegiatan kegiatan Kelembagaan	153 Kelurahan/ 100%	76,16%	83,50	16,50
Meningkatnya Pelayanan Dan Administrasi Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	90,44%	66,45	33,55
	Terpenuhinya Dokumen Administrasi Keuangan	18 Dokumen	95,42%	80,75	19,25
	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	50,87%	87,03	12,97
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	84,77%	78,15	21,85
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	48,11%	82,86	17,14
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	82,31%	94,20	5,80
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	89,93%	87,84	12,16
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94,00%	96,30	3,70
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	58,10%	79,62	20,38
	Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	91,53%	94,36	5,64
	Terlaksananya Penataan Organisasi	100%	82,88%	96,41	3,59
	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Makassar	100%	80,19%	86,26	13,74

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2022

lingkup Sekretariat daerah Kota Makassar adalah rata-rata sebesar 17,20%.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan kegiatan dan program berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Sekretariat Daerah Kota Makassar tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran. Adapun sumber pembiayaan pada tahun 2022 yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kota Makassar adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Total alokasi anggaran untuk belanja operasi berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial pada pada Sekretariat Daerah Kota Makassar adalah Rp.287.182.867.952,- dengan realisasi Rp.250.102.363.193,- (87.09%).

b. Belanja Modal

Total alokasi anggaran untuk belanja modal Sekretariat Daerah Kota Makassar berupa belanja peralatan dan mesin dan belanja aset lainnya adalah sebesar Rp. 20.991.058.168,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.323.099.914,- (87.29%).

Gambaran situasi anggaran yang dialokasikan di Sekretariat Daerah selama Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja sesuai anggaran yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2022.

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Rp)	Persentase
1.	Belanja Operasi	287.182.867.952	250.102.363.193	87,09
	- Belanja Pegawai	40.199.270.587	32.805.692.599	81,61
	- Belanja Barang / Jasa	202.593.597.365	174.313.065.000	86,04
	- Belanja Hibah	44.360.000.000	42.965.000.000	96,86
	- Belanja Bantuan Sosial	30.000.000	18.605.000	62,02
2.	Belanja Modal	20.991.058.168	18.323.099.914	87,29
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.598.558.168	18.028.846.184	87,52
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	392.500.000	294.253.730	74,97
	Jumlah Belanja	308.173.926.120	268.425.463.013	87,10

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refotmasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan untuk mengukur kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2021-2026 Kota Makassar, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022.

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum tidak memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga capaian yang dihasilkan adalah 87.10% (tinggi). Dengan demikian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Makassar yaitu memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah dapat diwujudkan, tetapi beberapa kegiatan tidak sepenuhnya dapat mendukung pencapaian kinerja disebabkan pengalihan anggaran kegiatan ke penanganan pandemic Covid-19.

Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Daerah memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari sistem perencanaan. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tantangan bagi Sekretariat Daerah dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

B. REKOMENDASI

Adapun Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2022 yaitu dengan lebih fokus terhadap sasaran dan program yang strategis, meningkatkan kinerja SDM untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi semaksimal mungkin dalam menyelesaikan sarasan, program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih kecil. Untuk itu perlu kiranya memperkuat tugas dan fungsi setiap Bagian dan meningkatkan kapasitas aparatur sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam merumuskan kebijakan sebagai bentuk dalam memenuhi tuntutan tantangan kebijakan pembangunan di masa mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2022, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2022 telah memenuhi kewajiban akuntabilitas. Jika masih ada hal-hal yang dalam penyelenggaraan laporan ini, akan dijadikan bahan introspeksi agar dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimasa yang akan datang sehingga diharapkan LAKIP ini dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).